

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mobilias pertumbuhan ekonomi suatu negara cerminan dari bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi tata ruang terkecilnya yaitu pertumbuhan ekonomi desa. Dalam menumbuhkan sektor ekonomi, lembaga keuangan merupakan badan yang memberikan pengaruh penting di dalamnya. Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah.

Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, *Building Society*, *Credit Union*, pialang saham, asset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun dan bisnis serupa lainnya. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Saat ini Lembaga Keuangan lebih dikenal dengan Lembaga Perbankan menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 1998. Keberadaan LPD yang merupakan lembaga keuangan milik komunitas adat diatur secara mandiri oleh Peraturan Daerah artinya tidak diatur oleh pemerintah seperti otoritas jasa keuangan lainnya (Astrayani, 2017).

Pemerintah Daerah Bali menetapkan Keputusan Gubernur Nomor: 972 Tahun 1984, tanggal 1 November 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa. LPD sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban aktivitas perekonomian yang telah berlangsung dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi (Roviyantie, 2011). Tentunya dalam setiap lembaga keuangan menginginkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh bendahara keuangannya berupa laporan keuangan yang berkualitas karena dapat berpengaruh bagi kemajuan lembaga keuangan itu sendiri sesuai dengan peraturan LPD No.3 Tahun 2017

Fenomena yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Serangan adalah dana di LPD Serangan digelapkan sebesar 1,4 miliar. Awal terjadinya kasus ini karena Disebutkan seorang warga mengatakan bahwa terdapat kerugian yang tidak dibukukan di LPD. Pria berinisial IMS, diduga telah menggunakan uang LPD Desa Adat Serangan senilai Rp 1,4 miliar. Ini berawal dari ada seorang yang mendepositokan uang sebesar Rp 2 miliar di LPD Serangan, namun yang dibukukan hanya Rp 600 juta. Sementara sisanya yaitu Rp1,4 miliar diduga digunakan oleh orang berinisial IMS tersebut. Atas pernyataan tersebut, IMS atau I Made Sedana yang sekaligus merupakan Bendesa Adat Desa Serangan pun buka suara. Made Sedana menjelaskan bahwa Uang Rp1,4 miliar yang disebut itu memang ada penguasaannya. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan cara meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dengan meningkatkan kualitas laporan

keuangan maka kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat yang mana penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kualitas laporan keuangan adalah hasil relaksasi dari sekian banyak transaksi yang terjadi didalam suatu perusahaan dimana transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang bersifat finansial dicatat, digolongkan dan diringkas dalam satuan uang, dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan kemampuan. Terdapat berbagai faktor dalam penelitian ini yang berpengaruh dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menunjukkan dan mengaplikasikan keterampilannya dalam kehidupan nyata. Lingkup kompetensi sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah sejauh mana kompetensi pegawai LPD khususnya bendahara keuangan memberikan pengaruh bagi dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas. pengaruh kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi dengan kualitas laporan keuangan mengacu pada penelitian yang dilakukan Desiana (2014) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Yuliani & Agustini (2016) yang membuktikan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan teknologi informasi. Faktor ini perlu diamati sejauh mana dapat mempengaruhi dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas oleh bendahara keuangan LPD adalah diterapkannya teknologi informasi di LPD. Secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Selain itu dapat menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah. (Sembiring, 2013). Hubungan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan mengacu pada penelitian yang dilakukan Lediana (2013) menyatakan bahwa efektivitas penerapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian oleh Nilamsari (2020), hasil penelitian membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Kualitas laporan keuangan juga di pengaruhi oleh *locus of control* yang merupakan aspek yang ada dalam diri individu pegawai. *Locus of Control* adalah persepsi seseorang terhadap keberhasilan atau kegagalan dimaksud dalam hal ini adalah sejauh mana kompetensi pegawai LPD khususnya bendahara keuangan memberikan pengaruh bagi dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas. dalam melakukan berbagai kegiatan di dalam hidupnya yang dihubungkan dengan faktor *External Locus of Control* dari individu yang di dalamnya mencakup nasib, keberuntungan, kekuasaan atasan dan lingkungan kerja serta faktor *Internal Locus of Control* yang di dalamnya mencakup kemampuan kerja dan tindakan kerja yang berhubungan

dengan keberhasilan dan kegagalan kerja individu yang bersangkutan (Wibowo, 2010:17). Hubungan *Locus of Control* dengan kualitas laporan keuangan belum diteliti saat ini, hanya saja penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Jayanti (2017) menyatakan bahwa *Locus of control* berpengaruh positif signifikan terhadap reduksi kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian dari Sudiartini (2018) bahwa terdapat pengaruh negatif antara *locus of control eksternal* dengan kinerja individu.

Dalam pengelolaan yang dilakukan LPD, sangat membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki etika yang baik, agar LPD yang dijalankan akan berkembang dengan baik kedepannya. Etika adalah nilai moral yang menjadi acuan manusia secara individu maupun kelompok dalam mengatur segala tingkah lakunya. Kepemimpinan yang didefinisikan oleh Wibowo (2011) merupakan suatu proses pengaruh antara orang. Proses tersebut bertujuan memotivasi bawahan, mencapai visi masa depan dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Etika dalam kepemimpinan dikaitkan tentang bagaimana pemimpin dapat memimpin pengikutnya dengan tetap mengindahkan kaidah, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian Bhegawati (2021) menyatakan etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian Astrayani (2017) menyatakan bahwa Etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah fungsi badan pengawas. Menurut Suartana (2010:19) peran badan pengawas internal secara aktif mengawasi kebijakan, operasional, praktik akuntansi,

pelaporan keuangan dan menjadi penghubung antar pengelola dengan auditor eksternal bila diperlukan. Nudilah (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh fungsi badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil dari penelitiannya menyatakan fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Diani (2014) juga melakukan penelitian sejenis, hasil penelitiannya menyatakan bahwa fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Dengan melihat adanya ketidak-konsistenan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang etika kepemimpinan, *locus of control*, fungsi badan pengawas, dan penerapan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada LPD Di Kecamatan Denpasar Utara. Penentuan lokasi ini karena sejauh ini LPD yang masih dominan sebagai lembaga penopang perekonomian desa pekraman dari lembaga-lembaga keuangan lainnya, sehingga telah disarankan oleh desa krama adat dalam rangka menopang pembangunan serta pelaksanaan upacara keagamaan maupun dalam meningkatkan sumber daya manusia. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian pada beberapa peneliti dan mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Teknologi Informasi, *Locus of Control*, Etika Kepemimpinan, dan Fungsi Badan Pengawas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Denpasar Utara”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang tersebut dapat diajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LPD?
2. Apakah Penerapan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LPD?
3. Apakah *Locus of Control* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LPD?
4. Apakah Etika Kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LPD?
5. Apakah Fungsi Badan Pengawas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LPD?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka yang menjadi tujuan peneliti adalah :

1. Untuk menganalisis & memperoleh bukti empiris pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas laporan Keuangan LPD
2. Untuk menganalisis & memperoleh bukti empiris pengaruh Penerapan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD
3. Untuk menganalisis & memperoleh bukti empiris *Locus of Control* terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD

4. Untuk menganalisis & memperoleh bukti empiris pengaruh Etika kepemimpinan terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD
5. Untuk menganalisis & memperoleh bukti empiris pengaruh Fungsi Badan pengawas terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu hasil studi empiris untuk memberikan pemahaman, gambaran dan wawasan mengenai pengaruh keterlibatan pemakai, kemampuan Teknik personal, dukungan manajemen puncak, serta ukuran organisasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Bagi universitas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu akuntansi dan sebagai referensi terhadap masalah yang terkait.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan informasi bagi LPD dalam memecahkan masalah yang ada guna meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan konsep yang menggambarkan hubungan kontraktual antara principal dan agent (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam penelitian ini, Desa Pakraman bertindak sebagai principal, sementara pengurus LPD sebagai agent. Dalam hal ini LPD sebagai agen wajib menyajikan laporan keuangan secara wajar sehingga dapat memberikan informasi yang akuntabel terhadap pihak principal. Salah satu yang dapat dilakukan di masing-masing LPD adalah dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, *locus of control*, etika kepemimpinan dan fungsi badan pengawas untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas.

LPD merupakan organisasi yang sarat dengan nilai, prinsip, atau karakteristik dan menerapkan motif pelayanan sebagai tujuan utamanya dalam organisasi. Salah satu tanggung jawabnya adalah membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh LPD merupakan sumber informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan LPD yang berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat. Informasi keuangan tersebut dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan LPD oleh para pihak prinsipal di LPD.

Berdasarkan teori keagenan, kualitas dan informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh agen (pengelola LPD) dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepercayaan kepada anggota LPD sebagai prinsip bahwa mereka menerima pengembalian dana yang diinvestasikan, serta sumber informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan LPD. Di sisi lain, jika kualitas laporan yang dihasilkan buruk, maka anggota LPD dan kreditur sebagai pihak prinsipal akan ragu untuk menyediakan dananya untuk dikelola karena tidak ada jaminan atas pengembalian yang telah diberikan. Laporan keuangan yang dihasilkan pengurus LPD selanjutnya akan dikoreksi oleh badan pengawas LPD selaku auditor internal, sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada anggota dapat dipercaya dan tidak menyesatkan. Teori ini memiliki hubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan, dalam penelitian ini meneliti lima faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. Faktor-faktor tersebut adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, *locus of control*, etika kepemimpinan, dan fungsi badan pengawas.

2.1.2 Lembaga Perkreditan Desa

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bali No. 972 Tahun 1984 yang kemudian dikukuhkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Bali Tingkat I Bali No. 2 Tahun 1988 tertanggal 27 Januari dan telah diperbaharui Kembali dengan Peraturan Daerah (perda) Provinsi Bali no 8 Tahun 2002 Tanggal 12 September 2002 serta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 3 tahun 2007, yang kemudian dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan Gubernur Bali

No. 11 tahun 2013 dijelaskan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah suatu wadah kekayaan desa yang menjalankan fungsinya dalam bentuk usah-usaha kearah peningkatan taraf hidup krama desa. Dan sesuai dengan Undang-Undangg (UU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, mengakui keberadaan LPD sebagai Lembaga keuangan yang bersifat khusus sehingga pengaturannya dikecualikan dari UU tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Bab XIII ketentuan Peralihan pasal 39 ayat 3 yang berbunyi “Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali berkembang sejak tahun 1985 yang dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan Desa atas dasar pertimbangan bahwa :

1. Desa pakraman merupakan Lembaga tradisional yang lebih mengakar dan dihormati oleh masyarakat pedesaan terutama karena pekramannya (anggota desa pakraman)
2. Desa pakraman mempunyai aturan-aturan yang telah disepakati dan dipatuhi baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
3. Desa pakraman merupakan suatu Lembaga tradisional dan bersifat kelompok yang didasarkan pada geografis pekraman.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bali no. 8 Tahun 2002 juga tercantum fungsi dan tujuan LPD antara lain :

1. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta menyalurkan modal yang efektif.
2. Memberantas gadaai gelap dan sejenisnya.
3. Menciptakan pemertaan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan.

4. Meningkatkan daya beli dan kelancaran lalu lintas pembayaran serta peredaran uang di desa.

Keputusan peralihan Undang-Undang Perbankan No. 7 Pasal 58 Tahun 1992 menyatakan bahwa : Bank Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumpung Putih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Bank Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produk Desa (BKPD), dan Lembaga-lembaga lain yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) setelah memenuhi persyaratan serta tatacara yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa karena LPD tidak mengajukan diri sebagai BPR maka LPD bukan merupakan bagian dari system perbankan. Namun berdsarkan Peraturan daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 2002 secara operasiona LPD melakukan fungsi intermediasi keuangan sebagaimana layaknya sebuah BPR.

Pengelolaan LPD dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada krama desa dan di dalam melaksanakan dan mengelola LPD pengurus dapat mengangkat karyawan dalam membantu kegiatan operasional Lembaga. Pasal 7 Peraturan daerah Provinsi Tingkat I Bali Nomor 8 tahun 2002 menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh LPD adalah sebagai berikut :

1. Menerima atau menghimpun dana krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito.

2. Memberikan pinjaman hanya kepada krama desa untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif pada sector pertanian, industry atau kerajinan kecil, perdagangan dan usaha-usaha lain yang dipandang perlu.
3. Menerima pinjaman-pinjaman dari Lembaga-lembaga keuangan maksimal sebesar 100% (serratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali Batasan lain dalam jumlah pinjaman atau bantuan dana.
4. Menyimpan kelebihan likuidasinya pada Bank Pembangunan Daerah dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Kegiatan usaha LPD adalah menerima dan menyalurkan dana pada masyarakat desa adat serta kegiatan jasa keuangan yang sejenis. Dapat disimpulkan bahwa LPD merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang identik dengan jasa bank yaitu sebagai Lembaga perantara keuangan masyarakat. LPD sebagai Lembaga keuangan desa dalam kegiatan operasionalnya dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan LPD dilakukan oleh badan pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh krama desa melalui paruman dan ditetapkan oleh bupati atau walikota sebagai kepala daerah. Terdapat Tata Kelola Lembaga Perkreditan Desa yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi dan perencanaan

Berdasarkan PERDA Provinsi Bali No.8/2002, setiap LPD dikelola oleh sebuah komite (ketua, kasir dan petugas administrasi). Deskripsi manajemen inti dapat dijelaskan bahwa ketua bertugas mengordinasi kegiatan operasional harian LPD, pembuatan perjanjian kontrak dengan

nasabah, bertanggung jawab pada desa adat melalui pemimpinnya (Dewan Pengawas LPD), menyusun rencana kegiatan dan anggaran, dan memformulasikan kebijakan LPD.

Petugas administrasi melakukan tugas-tugas administrasi, baik administrasi umum maupun tata buku, bertanggung jawab kepada ketua LPD, menyusun laporan neraca dan laporan pendapatan, serta mengelola arsip. Sedangkan kasir adalah mencatat aliran dana. Staf LPD membantu ketua melaksanakan tugasnya dan terlibat dalam pembuatan kegiatan dan rencana anggaran dalam keputusan pemberian kredit. Dalam mengelola LPD, tim manajemen juga memantau perubahan situasi makro-ekonomi, melakukan rapat formal triwulanan untuk evaluasi internal yang melibatkan semua staf. Staf pengumpul kredit diberi pengarahan harian mengenai tugas mereka oleh ketua LPD sebelum mereka mulai bekerja. Evaluasi internal LPD dilakukan oleh Dewan pengawas.

Hal ini membenarkan pendapat bahwa struktur organisasi LPD mampu mengimplementasikan kebijakan dan strategi LPD untuk mencapai tujuannya. Kemampuan manajemen internal LPD memperoleh dukungan dari pengawasan dan bimbingan yang diberikan pemerintah local pada tiap tingkatan dan oleh bank BPD Bali.

2. Prosedur Rekrutmen

Tim manajemen inti direkrut dari desa adat local. Mereka dipilih dari anggota komunitas desa dan ditetapkan dalam rapat desa untuk periode empat tahun. Namun mereka dapat dipilih kembali apabila mampu bekerja dengan baik (Government of Bali, 2002, Article 11). Komite

manajemen biasanya dibantu oleh dua atau tiga staf yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan tabungan dan pinjaman.

Menurut pasal 11(4) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8/2002 bahwa salah satu tugas penting komite inti adalah menjalankan kewenangan untuk menunjuk staf baru atau untuk memberhentikan staf manajemen operasional LPD. Rekrutmen staf tambahan dilakukan berdasarkan perkembangan skala usaha LPD. Pemilihan staf baru oleh Dewan Pengawas juga didasarkan atas tes kemampuan dan sifat atau karakter pelamar, dan masing-masing dusun di desa adat harus terwakili oleh anggota staf. Kemudian para pelamar mengikuti tes kemampuan (motivasi, kemauan untuk mengabdikan diri di LPD, dan pengetahuan umum) yang diadakan oleh PLPDK. Persyaratan umum untuk pelamar ialah memiliki minimal ijazah tingkat SMU. Singkatnya, prosedur rekrutmen ini menggambarkan pentingnya peran institusi informal dalam tata kelola LPD, dan menunjukkan kuatnya keterikatan LPD dengan lingkungan sosio-kulturalnya.

Prinsip Pengaturan Operasional Prinsip ini mencakup peraturan mengenai kecakupan modal (*capital adequacy*), batas jumlah peminjaman (*legal lending limit*), cadangan untuk kerugian pinjaman manajemen likuiditas, dan sistem pemeringkatan LPD. LPD harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dari lembaga keuangan agar dapat menjadi lembaga keuangan yang sehat. Berdasarkan kriteria CAMEL BPR yang diterapkan BI berdasarkan surat edaran No. 30/UUPB, 30 April 1997 (Bank BPD Bali, 2000) bahwa pengaturan ini

mengatur CAR, kualitas aset produktif, aspek manajemen, pendapatan dan likuiditas.

3. Mekanisme Penyaluran Pinjaman

Dalam kaitannya dengan tingkat bunga, pada tahun 2002 tingkat bunga pinjaman untuk pinjaman berkisar antara 27 hingga 33 persen, lebih tinggi dari pada rata – rata tingkat bunga bank umum yang hanya 22 persen pertahun pada saat itu. Peraturan desa adat juga berlaku bagi staf LPD (Oka, 1999) yang melanggar peraturan dan salah dalam mengelola operasional harian LPD, seperti kolusi, korupsi atau manipulasi. Sanksi sosial dapat dikenakan pada mereka. Selain itu, berdasarkan peraturan legal formal, pasal 24 peraturan Daerah No. 8 / 2002 yang menyatakan bahwa staf LPD yang melanggar peraturan dan menyebabkan LPD menderita kerugian keuangan haruslah mengganti kerugian tersebut. Pasal 26 yang menerangkan pasal 24 peraturan tersebut menekankan bahwa staf terpidana dapat memperoleh hukuman maksimum 6 bulan penjara atau maksimum denda Rp 5 juta. Singkatnya, gambaran ini menunjukkan bahwa institusi informal (seperti norma – norma dan sanksi sosial) dan institusi formal (peraturan legal formal) digunakan bersama- sama dalam tata – kelola LPD.

4. Sistem Penggajian

Sistem penggajian pada LPD secara umum dimaksudkan untuk menstimulasi kinerja yang lebih baik dari stafnya, terutama dalam mengumpulkan pinjaman dan mempromosikan dan melayani tabungan. Diantara manajemen inti LPD, ketua memperoleh gaji paling tinggi, diikuti

oleh petugas kasir dan tenaga administrasi. Prinsip penentuan gaji pokok yang didasarkan biaya hidup di desa di mana LPD berada juga tercermin pada kuatnya hubungan antara LPD dan lingkungan sosio-ekonominya.

Kondisi makro-ekonomi yang terus tumbuh dan stabil disertai dengan liberalisasi pasar keuangan pada tingkat nasional, stabilitas politik di Bali, dukungan dari pemerintah pada semua tingkat administrative, tingkat kohesi sosial masyarakat Bali yang tinggi dan struktur sosial tradisional yang penting telah mendukung pertumbuhan LPD. Tidak ada keraguan bahwa kondisi makro-ekonomi yang terus tumbuh dan stabil dan lingkungan sosio-kultural merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan LPD di Bali.

LPD dalam kegiatan usahanya menerima dan menyalurkan dana pada masyarakat desa adat serta kegiatan jasa keuangan yang sejenis. Dapat disimpulkan bahwa LPD merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang identik dengan jasa bank yaitu sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat. LPD sebagai lembaga keuangan desa dalam kegiatan operasionalnya melakukan pembinaan dan pengawasan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

Chairi dan Ghozali (2007:161) menyatakan bahwa pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan, informasi pelengkap, dan media pelaporan lainnya, sedangkan laporan keuangan hanya mencangkup neraca, laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan

keuangan. Hal itu berarti pelaporan keuangan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan laporan keuangan.

Menurut Djarwanto dalam Nudilah (2016) terdapat tiga bentuk laporan keuangan pokok yang dihasilkan oleh perusahaan secara umum, yaitu :

1. Laporan Neraca

Neraca dapat digunakan dalam menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Neraca digunakan sebagai gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu (*snapshoot* keuangan perusahaan), yang terdiri dari aset sumber daya perusahaan, dan klaim atas aset tersebut meliputi utang dan saham pribadi. Aset perusahaan menunjukkan keputusan penggunaan dana atau keputusan investasi masa lalu, sedangkan klaim perusahaan menunjukkan sumber dana atau keputusan pendanaan dimasa lalu. Dengan demikian, neraca adalah menampilkan keseimbangan antara keputusan investasi dengan keputusan pendanaan.

2. Laporan laba Rugi

Laporan Laba rugi merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Berbeda dengan neraca yang merupakan *snapshoot* maka laporan laba rugi hanya mencangkup kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu saja.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai aliran kas yang masuk maupun keluar bersih pada suatu periode waktu yang merupakan hasil dari tiga kegiatan pokok perusahaan yaitu operasional, investasi, dan pendaan. Laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik sehingga

dapat menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh laporan keuangan.

Ada empat karakteristik yang merupakan syarat laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas, yaitu ;

1. Relevan

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mekoreksikan informasi yang relevan yaitu:

- a. Mempunyai manfaat umpan balik, yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan serta mengkoreksi dimasa lalu.
- b. Mempunyai manfaat memprediktif, yaitu informasi dapat membantu pengguna dalam memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil dari masa lalu dan kejadian dimasa sekarang.
- c. Tepat waktu, yaitu informasi yang disajikan tepat waktu sehingga berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, yaitu informasi yang disajikan selengkap mungkin mencakup semua semua informasi akuntansi.

2. Andal

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur, artinya informasi menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa yang seharusnya disajikan.
- b. Dapat diverifikasi, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda

3. Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan dapat dibandingkan artinya informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

4. Dapat Dipahami

Laporan keuangan dikatakan dapat dipahami apabila informasi yang disajikan oleh pengguna dan dapat dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan secara sederhana dapat dilakukan melalui enam langkah berikut:

- a. Penyusunan neraca saldo berupa daftar buku besar yang terdiri dari saldo debit dan kredit.
- b. Pengumpulan data untuk membuat jurnal penyesuaian dari transaksi-transaksi yang ternyata belum tercatat di neraca saldo.
- c. Pembuatan neraca lajur guna melengkapi data yang belum tercatat di neraca saldo dari informasi yang ada pada jurnal penyesuaian.
- d. Pembuatan laporan keuangan (laporan laba rugi, arus kas, perubahan modal)
- e. Penyesuaian dan penutupan rekening dari tiap laporan.

- f. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan guna mengecek ulang keseimbangan dan kecocokan kredit dan debit.

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Mangkunegara, kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Kompetensi SDM yang berupa kemampuan dan pengetahuan bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan, sedangkan motif kompetensi dapat diperoleh pada saat proses seleksi. Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk katagori baik atau rata-rata.

Kompetensi sumber daya manusia menurut hasil kajian Perrin yaitu :

1. Memiliki kemampuan komputer (Eksekutif Lini)
2. Memiliki pengetahuan yang luas tentang visi
3. Memiliki kemampuan mengantisipasi pengaruh perubahan
4. Memiliki kemampuan memberikan pendidikan tentang SDA.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Tiga hal pokok dalam kompetensi SDM adalah:

1. Pengetahuan (*Knowledge*), merupakan penguasaan ilmu dan teknologi yang dimiliki seseorang, dan diperoleh melalui proses pembelajaran

serta pengalaman selama kehidupannya. Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Indikator pengetahuan (*knowledge*) dalam hal ini adalah, pengetahuan manajemen bisnis, pengetahuan produk atau jasa, pengetahuan tentang konsumen, promosi dan strategi pemasaran.

2. Keterampilan (*Skill*), adalah merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal. Indikator keterampilan meliputi keterampilan produksi, berkomunikasi, kerjasama dan organisasi, pengawasan, keuangan, administrasi dan akuntansi.
3. Kemampuan (*Ability*), adalah kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Indikator kemampuan meliputi kemampuan mengelola bisnis, mengambil keputusan, memimpin, mengendalikan, berinovasi, situasi dan perubahan lingkungan bisnis.

2.1.5 Penerapan Teknologi Informasi

Teknologi informasi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi, bisnis, teknologi dan informasi yang menyebabkan semakin ketatnya persaingan pada setiap jenis usaha. Untuk menghadapi persaingan ekonomi dewasa ini, pengambilan kebijakan dalam perusahaan dituntut selalu efektif dan efisien untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya.

Lucas dan Spitler (1990) dalam Tjhai (2003:2), mengemukakan agar teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja, maka anggota dalam organisasi harus menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Apabila sumber daya manusia sudah memiliki kualitas yang baik dalam hal ini kemampuan akuntansi maupun pengelolaan keuangan maka sumber daya manusia tersebut akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula. Hal ini juga harus didukung oleh penggunaan teknologi yang memadai.

Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkatan pencapaian hasil yang diharapkan. Efektivitas sistem informasi akuntansi merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target dapat dicapai dari suatu kumpulan sumber daya yang diatur untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data elektronik, kemudian mengubahnya menjadi sebuah informasi yang berguna serta menyediakan laporan formal yang dibutuhkan dengan baik secara kualitas maupun waktu. Secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Selain itu dapat menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah.

2.1.6 *Locus Of Control*

Locus of Control adalah persepsi seseorang terhadap keberhasilan atau kegagalan dimaksud dalam hal ini adalah sejauh mana kompetensi pegawai LPD khususnya bendahara keuangan memberikan pengaruh bagi dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini termasuk pada

keyakinan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan dalam melakukan berbagai kegiatan di dalam hidupnya disebabkan oleh kendali dirinya atau kendali di luar dirinya.

Individu dikatakan memiliki *internal locus of control* karena individu tersebut menyakini bahwa semua peristiwa yang terjadi adalah dibawah kendali dirinya sendiri. Hal ini berarti bahwa didalam diri seseorang tersebut memiliki potensi yang besar untuk menentukan arah hidupnya, tidak peduli apakah faktor lingkungan akan mendukung atau tidak. Individu seperti ini percaya mereka mempunyai kemampuan menghadapi tantangan dan ancaman yang timbul dari lingkungan dan berusaha memecahkan masalah dengan keyakinan yang tinggi sehingga strategi penyelesaian atas konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Individu yang memiliki *external locus of control* lebih mudah merasa terancam, menyerah dan tidak berdaya ketika menghadapi suatu konflik. Individu semacam ini akan memandang masalah-masalah yang sulit sebagai ancaman bagi dirinya. Bila mengalami kegagalan dalam menyelesaikan persoalan, maka individu tersebut cenderung tidak survive dan akhirnya individu tersebut mengalami kegagalan yang membuatnya ingin lari dari persoalan.

2.1.7 Etika Kepemimpinan

Etika adalah sebuah cabang filsafat mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya (Awatara, 2011). Pada setiap unit usaha baik pemerintah maupun swasta dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi yang

belaku. Menyusun sebuah laporan keuangan yang berkualitas, etika kepemimpinan sangat diperlukan.

Seorang pemimpin yang memiliki etika yang baik akan mampu membawa organisasi yang dipimpinnya sampai ke puncak keberhasilan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada pada semua anggota organisasi yang dipimpin. Etika dalam kepemimpinan dikaitkan dengan bagaimana cara pemimpin dapat memimpin pengikutnya dengan tetap mengindahkan kaidah, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat. Etika kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sesuai norma dan nilai yang berlaku. Kepemimpinan seorang manajer dapat dikatakan baik jika manajer tersebut dapat menjalankan etika yang baik. Etika kepemimpinan dapat terwujud apabila :

1. Pemimpin memiliki sifat jujur kepada pengikutnya
2. Pemimpin dapat dipercaya oleh para pengikutnya sehingga pengikutnya
3. Memiliki hubungan yang positif dengan pengikutnya
4. Dapat menerima saran dan kritik yang diberikan oleh pengikutnya
5. Dapat menilai dan memahami kinerja pengikutnya
6. Dapat bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dibebankan dengan cara menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya
7. Memiliki sifat adil, kritis, rendah hati, dan hormat kepada diri sendiri dan orang lain.

2.1.8 Fungsi Badan Pengawas

Peran badan pengawas internal secara aktif mengawasi kebijakan operasional, praktik akuntansi, pelaporan keuangan dan menjadi penghubung antara pengelola dengan auditor eksternal (Suartana, 2009). LPD sebagai lambang keuangan desa dalam kegiatan operasionalnya dilakukan pembinaan dan pengawasan. Sesuai dengan pasal 1 ayat (11) Perda No. 3 tahun 2007, yang dimaksud dengan pengawas internal adalah badan yang dibentuk oleh desa dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelola LPD. Peran badan pengawas internal adalah secara aktif mengawasi kebijakan operasional, praktik akuntansi, pelaporan keuangan, dan menjadi penghubung antara pengelola dengan auditor.

Struktur pengendalian intern sangatlah penting diterapkan didalam LPD karena struktur pengendalian intern dalam penerapannya tidak hanya untuk menjamin semua ketentuan telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku, namun juga berfungsi sebagai pengawas, baik dalam menghimpun kelebihan dana yang ada pada masyarakat, dan juga dalam melakukan ekspansi kredit serta mengatur penyebaran resiko sehingga kredit tidak hanya terpusat pada salah satu debitur atau pada salah satu kelompok debitur tertentu. Badan Pengawas LPD merupakan pihak yang membantu memastikan bahwa laporan keuangan dibuat secara efektif tanpa terdapat kecurangan sehingga dapat diperoleh laporan keuangan yang berkualitas dan akurat. Fungsi badan pengawas juga memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pada LPD. Setiap LPD harus mempunyai pengendalian intern yang mampu

menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang akan dapat merugikan perusahaan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas badan pengawas internal dapat bertindak sebagai auditor internal yang akan mengontrol laporan keuangan agar tidak terdapat manipulasi data dalam laporan keuangan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian yang dilakukan Yuliani & Agustini (2016) dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian ini mengatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan Astrayani (2017) dengan judul “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal”. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik analisis linear berganda. Hasil penelitiannya bahwa Etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan Wijayanti (2017) dengan judul “pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Sukoharjo)”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sistem pengendalian intern dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh karuniawan, dkk (2017) dengan judul “pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, dan *locus of control* terhadap kualitas laporan keuangan”. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, dan *locus of control* berpengaruh positif terhadap laporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan Putra (2018) dengan judul “Pengaruh Etika Kepemimpinan dan Fungsi Badan Pengawas terhadap kualitas laporan keuangan”. Adapun Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan fungsi badan pengawas berpengaruh positif pada kualitas pelaporan keuangan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh suari, dkk (2019) dengan judul “Kualitas Pelaporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di kabupaten Gianyar, Bali”. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan sedangkan etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Paramitha (2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Karyawan Dan Teknologi Informasi Pada Kualitas Laporan Keuangan LPD Dengan Pendidikan Sebagai Variabel Pemoderasi”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah MRA dengan Uji Selisih Mutlak. Hasil penelitian menunjukkan teknologi informasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan

Hasil penelitian yang dilakukan yanti (2019) dengan judul “pengaruh etika kepemimpinan dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan”. Adapun Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh bahwa etika kepemimpinan dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan Dewi (2019) meneliti dengan judul “Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan LPD Di Kota Denpasar”. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis regresi

linear berganda. Hasil penelitiannya Tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas internal, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif, sedangkan kualitas sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian Gasperz (2019) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku)”. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian Sinaranata (2019) yang berjudul “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan pengawas dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan”. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa etika kepemimpinan tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan sedangkan fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian Nilamsari (2020) yang berjudul “Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi OPD Kota Semarang”. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis regresi linear

berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian Pebrianti dan Andayani (2021) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada LPD SeKecamatan Gianyar”. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan fungsi badan pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Hasil penelitian Bhegawati (2021) yang berjudul “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan LPD di Kota Denpasar”. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Hasil Penelitian Damayanti (2022) yang berjudul “Pengaruh *Locus Of Control*, Pengendalian Internal dan Pengalaman Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa *locus of control*, sistem pengendalian internal dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Secara umum, persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan. Sementara itu, perbedaannya adalah terdapat variabel independent yang digunakan. Penelitian ini menggunakan lima variabel independent, yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, *locus of control*, etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas. Selain itu, perbedaan yg mendasar terletak pada lokasi penelitian yg digunakan, dimana penelitian ini menggunakan lokasi penelitian di LPD kecamatan Denpasar Utara.

